

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGUNA BARANG (UAKPB) KPKNL JAKARTA II

UNTUK PERIODE TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI
JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II
JL. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA 10410 TELEPON (021) 34835236, FAKSIMILE (021)
34835134

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (CaLBMN)
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan BMN/D;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014, tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007, tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007, tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Surat Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan RI Nomor: S-2/KN/2014 Tanggal 02 Januari 2014, tentang Form Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK 06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

B. ENTITAS PELAPORAN

Satuan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang JAKARTA II merupakan salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pembantu Pengguna Barang yang berada dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (015), dengan Eselon-1 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Satuan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara JAKARTA II adalah Satuan Kerja dengan Kode Satuan Kerja adalah 015090700604442000KD, yang beralamatkan di Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, RW.1, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410, yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN.

C. PERIODE LAPORAN

Laporan ini menyajikan informasi mutasi aset yang terjadi selama tanggal 01 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023 mencakup aset tetap, persediaan, dan aset lainnya.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang JAKARTA II pada umumnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, untuk memperoleh data yang akurat khususnya perolehan BMN, ada kebijakan tersendiri dalam perekaman/pengimputan data. Kebijakan dalam perekaman/pencatatan data perolehan BMN diinput berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang. Hal ini dilakukan untuk memastikan BMN yang diinput sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

A. Penggolongan/Kodefikasi, dan Kapitalisasi

Penggolongan/kodefikasi, dan kapitalisasi dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan-peraturan yang mendasarinya.

B. Rekonsiliasi

Pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan. Rekonsiliasi bulanan diawali dengan rekonsiliasi internal yang dilaksanakan secara terjadwal antar operator BMN dan Keuangan.

C. Penyusutan BMN

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang JAKARTA II dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 dan berubah menjadi PMK Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Jakarta II.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun 2023 ini adalah sebesar Rp3.098.567.209 (tiga miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp3.073.761.129 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp578.072.580 (lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Dalam Pengerjaan (ICDP);
5. Laporan Aset Talc Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
10. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
11. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II;

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2023

Nilai BMN per 01 Januari 2023 KPKNL Jakarta II adalah sebesar Rp3.073.761.129 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp3.071.190.729 (tiga miliar tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp2.570.400 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Selama Tahun Anggaran 2023

Mutasi BMN selama Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.117.990 (tiga juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), jumlah tersebut terdiri dan saldo awal sebesar Rp480.600,00 (empat ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) dan total mutasi tambah persediaan selama periode tahun anggaran sebesar Rp137.094.519 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dan mutasi kurang persediaan selama periode tahun anggaran sebesar Rp134.457.129 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah)

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111 Barang Konsumsi	480.600,00	137.094.519	134.457.129	3.117.990
JUMLAH	480.600,00	137.094.519	134.457.129	3.117.990

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0 yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0 (Nol Rupiah) dan kondisi usang senilai Rp0,00 (Nol Rupiah).

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0 (Nol rupiah) / Nihil (tidak memiliki tanah).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
NIHIL	0,00

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
NIHIL	0

Dan jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Jumlah Kuantitas Nilai	Jumlah (Rp)
Baik	NIHIL	NIHIL
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah Rp0,00 (Nol Rupiah). Tidak Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II.

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah)/ Nihil.

Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
NIHIL	0,00

Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
NIHIL	0,00

Dan jumlah/nilai Gedung dan Bangunan di atas, jumlah bidang Gedung dan Bangunan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan

nilai sebesar Rp0, 00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan /pemindahtanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Rincian data Gedung dan Bangunan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Jumlah Kuantitas	Jumlah (Rp)
Baik	NIHIL	NIHIL
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Gedung dan Bangunan yang statusnya dihentikan dan penggunaan operasional pemerintah adalah m2/Rp0,00 (Nol Rupiah). Tidak Terdapat permasalahan pada BMN berupa Gedung dan Bangunan yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) / Nihil (tidak memiliki tanah). Mutasi Tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
NIHIL	0,00

Mutasi Kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
NIHIL	0,00

Dan jumlah/nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan di atas, jumlah bidang Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0, 00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan /pemindahtanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Rincian data Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Jumlah Kuantitas	Jumlah (Rp)
Baik	NIHIL	NIHIL
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah Rp0,00 (Nol Rupiah). Tidak Terdapat permasalahan pada BMN berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II.

e. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah)/Nihil (tidak memiliki tanah).

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
NIHIL	0,00

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
NIHIL	0,00

Dan jumlah/nilai Aset Tak Berwujud di atas, jumlah Aset Tak Berwujud yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0, 00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Rincian data Aset Tak Berwujud berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Jumlah Kuantitas	Jumlah (Rp)
Baik	NIHIL	NIHIL
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah Rp0,00 (Nol Rupiah). Tidak Terdapat permasalahan pada BMN berupa Aset Tak berwujud yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II.

f. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah)/ Nihil.

Mutasi Tambah Aset Lain-lain tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
NIHIL	0,00

Mutasi Kurang Aset Lain-lain tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
NIHIL	0,00

Dan jumlah/nilai Aset Lain-lain di atas, jumlah aset lain-lain yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Rincian data Aset lain-lain berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Jumlah Kuantitas	Jumlah (Rp)
Baik	NIHIL	NIHIL
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Aset Lain-lain yang statusnya dihentikan penggunaan operasional pemerintah adalah Rp0,00 (Nol Rupiah). Tidak Terdapat permasalahan pada BMN berupa Aset Lain-lain yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II.

g. Peralatan dan Mesin

Saldo Akhir Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.937.193.457 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp2.675.340.877 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), mutasi tambah sebesar Rp419.962.580 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp158.110.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat angkutan darat bermotor	1 unit	315.000.000	0
HP Smart Tank 750 (ADF) All-in-One Printer	3 unit	14.988.330	0
CCTV XVI	1 unit	9.296.250	0
Kabel	1 unit	0	378.000
Bracket Standing Peralatan	1 unit	2.800.000	0
LCD Monitor	1 unit	7.000.000	0
Lap Top	6 unit	70.500.000	0

Mutasi Kurang tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	158.110.000
Sepeda Motor	0,00

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

h. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.263.752 (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
NIHIL	0,00

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
NIHIL	0,00

Dan jumlah/nilai Aset Tetap Lainnya di atas, jumlah Aset Tetap Lainnya yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol) rupiah, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Rincian data Aset Tetap Lainnya berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Jumlah Kuantitas	Jumlah (Rp)
Baik	2	3.263.752,00
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	NIHIL	NIHIL

Aset Tetap Lainnya yang statusnya dihentikan penggunaan operasional pemerintah adalah Rp0,00 (Nol Rupiah). Tidak Terdapat permasalahan pada BMN berupa Aset Tetap Lainnya yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II.

i. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp158.110.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Mutasi Tambah Aset Lain-lain tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah(Rp)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	158.110.000

Mutasi Kurang Aset Lain-lain tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah(Rp)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	395.156.500

Dan jumlah/nilai Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan di atas, jumlah Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 (nol) unit

dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp158.110.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Rincian Akhir data Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Jumlah Kuantitas	Jumlah (Rp)
Baik	NIHIL	NIHIL
Rusak Ringan	NIHIL	NIHIL
Rusak Berat	1	158.110.000

Saldo Akhir Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan yang statusnya dihentikan penggunaan operasional pemerintah adalah 1 (satu) unit, sejumlah Rp158.110.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah).. Tidak Terdapat permasalahan pada BMN berupa Aset Lain-lain yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II.

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis BMN	Sesuai dengan ketentuan		Tidak Sesuai dengan ketentuan	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
1	2	3	4	5
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	522	573.394.280	-	-
Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	2	3.263.752	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-

Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	524	576.658.032	-	-

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan	35	-	6	6	47
2	a.Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b.Ditolak	-	-	-	-	-
	c.Disetujui	-	-	-	-	-
3	Dalam proses tindak lanjut Pengguna	-	-	-	-	-
	Barang/Kuasa Pengguna Barang					
4	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	2	-	2	2	6
5	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna	2	-	2	2	6
6	Selesai serah terima	-	-	2	2	4

Keterangan: *) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-EI

c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan. Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

2. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang
 - a. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat yang telah dilakukan permohonan penilaian.
 - b. Tindaklanjut diusulkan dengan penghapusan kepada Pengelola Barang

3. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

- a. Beban kerja pada Satuan Kerja Pengelola menyebabkan antrian proses pelaksanaan penghapusan BMN.
- b. Kondisi pandemic covid-19 menyulitkan koordinasi dengan beberapa pihak terkait di lapangan.

4. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Tim Penghapusan mempercepat proses usulan penghapusan;
- b. Melakukan koordinasi, kolaborasi dan monitoring-evaluasi terhadap rencana kerja.

VI. PENUTUP

Dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2023 dimungkinkan masih banyak kekurangannya, untuk itu kami mohon bantuan dan saran yang sifatnya membangun demi tercapainya pengelolaan BMN lebih baik.

Jakarta, 11 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPB



Ditandatangani secara elektronik
Mokhamad Arif Setyawantika